



Judul : Dana Aspirasi DPR: Enam Fraksi Ngotot Minta Jatah
Tanggal : Kamis, 02 Juli 2015
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 6

DANA ASPIRASI DPR

Enam Fraksi Ngotot Minta Jatah

“Kami tak ingin mengambil program yang bukan tugas parlemen.”

Istiqomatul Hayati

isti@tempo.co.id

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat berkukuh akan menyerahkan rangkuman usulan program pembangunan daerah pemilihan atau dana aspirasi kepada pemerintah. Kemarin, Dewan membacakan seluruh usulan program pembangunan daerah pemilihan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan.

“Dalam lima hari, usulan akan dirangkum pimpinan DPR untuk diajukan ke Presiden, KPK, dan BPK untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan seusai rapat.

Dari sepuluh fraksi di DPR, tiga fraksi, yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai NasDem, menolak mengajukan usul. Seluruh anggota Fraksi

Partai NasDem bahkan memilih meninggalkan ruangan pada awal rapat sebagai bentuk penolakan. “Kami tidak mau bertanggung jawab,” kata Wakil Ketua Fraksi NasDem, Jhonny G. Plate.

Adapun PDI Perjuangan menolak dengan tak membacakan tanggapan apa pun. Partai Hanura turut menolak karena usulan dana program ini dianggap tak sesuai dengan konstitusi dan berpotensi tumpang-tindih dengan dana reses DPR. “Hanura tidak ingin mengambil program yang bukan tugas DPR,” tutur Arief Suditomo, anggota fraksi itu.

Partai Demokrat memilih tak bersikap hingga ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah tentang mekanisme teknis program. Enam fraksi sisanya menyetujui program yang dianggarkan mencapai Rp 11,2 triliun itu.

DPR, kata Taufik, tak akan

memaksa pemerintah untuk menyetujui usulan yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 2016 itu. “DPR tidak mendesak. Yang penting sudah ada landasan konstitusi dalam tata tertib DPR bahwa anggota berhak mengajukan usulan program pembangunan,” kata Taufik.

Taufik menuturkan, seluruh program usulan anggota Dewan tak boleh bertentangan dengan program Nawacita Jokowi. Dalam rapat paripurna, Fraksi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan usulan pembangunan rumah layak huni, MCK, sekolah, perbaikan jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. “Tak betul harus Rp 20 miliar per anggota, yang penting programnya,” kata Taufik.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Joko Widodo menolak usulan program pembangunan daerah pemilihan itu. Uchok khawatir dana sebesar Rp 20